

# Dialog

Vol. 36, No. 2, November 2012

## Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

---

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011  
ISSN : 0126-396X

**PEMIMPIN UMUM:**  
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

**PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB**  
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat  
Dr. H. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**  
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan  
Drs. H. A.M. Khaolani, M.Pd.

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Astuty Nilawati, S.Pd.

**MITRA BESTARI (PEER REVIEW)**  
Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)  
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)  
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)  
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

**DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)**  
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud ( Sejarah dan Kebudayaan Islam)  
Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone (Pendidikan Islam)  
Dr. H. Imam Tolkhah (Sosiologi Agama)  
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)  
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)  
H. Chamdi Pamudji, S.H., M.M. (Pendidikan dan Pelatihan)  
Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc. (Pendidikan dan Pelatihan)

**REDAKTUR EKSEKUTIF**  
Dr. H. Susari, M.A.

**REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)**  
H. Sahlani, B.A.  
Reza Perwira, S.Th.I.  
Sofyan Yamin, S.Si.  
Rahmatillah Amin, S.Kom  
Wawan Hermawan, S.Kom

**ALAMAT REDAKSI**  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat  
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

**WEBSITE:**  
[www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.



---

## PENGANTAR REDAKSI

---







# DAFTAR ISI

---

ISSN : 0126-396X

**Jurnal DIALOG**  
**Vol.36, No.2, November 2012**

**HERDI SAHRASAD**

Agama dan Masalah Korupsi : Sebuah Catatan: 1-18

**IYOH MASTIYAH**

Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren: 19-30

**NURUDIN**

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-Keagamaan di Indonesia: 31-44

**SYAHRUL KIROM**

Pancasila dalam Bingkai Kerukunan Beragama : 45-64

**ALI USMAN**

Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia : 65-80

**ARIEF SUBHAN**

Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal : 81-94

**SYARIPULLOH**

Penanggulangan Kemiskinan : 95-112

**SUDIRMAN TEBBA**

Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia : 113-126

**SUPRAPTO**

Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang : 127-148

**BOOK REVIEW**

**AKMAL SALIM RUHANA**

Terorisme [sama dengan] Jihad? : 149-166

**KUMPULAN ABSTRAK 167-172**

**INDEKS PENULIS 173-174**

## TOPIK

---

# PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN: IKHTIAR MENGATASI KONFLIK SOSIAL-KEAGAMAAN DI INDONESIA

OLEH: NURUDIN \*)

---

### ABSTRACT

Krisis multidimensi, krisis etika, krisis kepercayaan diri, krisis kepercayaan sosial seakan belum akan beranjak dari negeri ini. Barangkali karena kejumudan dan kulminasi persoalan kebangsaan ini, lantas muncul wacana dan praktik “pendidikan karakter” yang seolah menjadi ramuan manjur mengobati penyakit struktural dan wabah kultural yang menjangkiti bangsa ini. Akankah pendidikan karakter mampu menjadi “pelipur lara” atas duka kebangsaan Indonesia yang tak kunjung usai? Benarkah pendidikan karakter yang sukses dapat mengurangi kejahatan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan agama? Dan tentu masih banyak lagi pertanyaan lain mengemuka kaitan dengan urgensi pendidikan karakter. Dalam tulisan ini, penulis berusaha memformulasi pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan sebagai ikhtiar mengatasi konflik sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia.

*Multidimensional crisis, a crisis of ethics, crisis of confidence, social confidence crisis as if will not go yet from this state. Perhaps due to stagnation and the culmination of this national issue, then appeared the discourse and practice of “character education” which seems to be a potent herb cure structural and cultural epidemic that plagues this nation. Will the character education to become “solace” of grief Indonesian nation would not go over? Is it true that a successful character education can reduce crime social, economic, political, legal, and religious? And of course there are many more questions raised related to character education urgency. In this paper, the author attempts to formulate a value-based character education as a humanitarian endeavor to overcome socio-religious conflict in Indonesia.*

### KEY WORDS:

*Character Education, Religious Radicalism, Human Value, Harmony.*

---

\*) Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

## A. PENDAHULUAN

Syarat utama menciptakan perdamaian dan kerukunan beragama adalah kepercayaan yang didasari rasa saling mengerti satu sama lain. Karena itu, masih mudahnya konflik agama yang berujung pada kekerasan yang meledak di negeri ini menunjukkan bahwa rasa saling percaya antar anak bangsa di negeri ini makin terkikis, dan pastilah ada yang hilang dalam hubungan antar agama di negeri ini yang pernah terkenal dengan kerukunannya.

Tingginya kepercayaan antar umat beragama adalah syarat mutlak bagi harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia yang memungkinkan agama-agama itu hidup rukun dan damai. Penyelesaian konflik membutuhkan komunikasi, dan komunikasi dapat terjadi karena adanya rasa saling percaya. Konflik sesungguhnya sesuatu yang alami, dimana konflik merupakan sesuatu yang inheren. Konflik agama telah ada ketika agama-agama itu ada. Selama manusia tak mampu membebaskan diri dari *stereotype* negatif tentang agama lain, konflik agama akan terus ada.

Meski demikian, konflik memiliki peluang dan ancaman di dalam dirinya. Karena itu, pengelolaan konflik dalam hal ini sangat dibutuhkan agar penyelesaian konflik membawa pada suatu kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi, hal yang utama bukanlah bagaimana meniadakan konflik, tapi bagaimana mengelola konflik tersebut secara benar melalui penggunaan saluran-saluran yang benar, agar tidak berujung pada kekerasan.

Dalam konteks historiografi kebangsaan, awal keberadaan negara bangsa Indonesia merupakan kesepakatan final dari para pendahulu pendiri

negeri ini, sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralitas yang menjadi pilar tegaknya negara. Dengan demikian *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi payung terakuinya kemajemukan sosial. Pluralitas adalah *sunnatullah* yang berlaku atas segala makhluk-Nya. Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, pluralitas telah melahirkan kolaborasi yang indah dalam berbagai bentuk *mozaik* budaya yang kental dengan kemajemukan ini. Berbagai suku, agama, ras adat-istiadat, budaya, dan golongan dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan masyarakat negeri katulistiwa ini pun menjadi kesaksian bagi dunia internasional. Akan tetapi, dunia pun terhentakkan dengan tercabik-cabiknya keindahan oleh sikap eksklusif yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama, ras, dan golongan.

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah pada dua dasawarsa terakhir, baik dalam eskalasi besar maupun kecil, telah membawa korban jiwa manusia, harta, sumber mata pencaharian, dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia. Nampaknya kerusuhan sosial tersebut telah menjadi gejala yang umum bagi perjalanan hidup bangsa ini.

Secara normatif-doktrinal, semua agama mengajarkan kedamaian, persaudaraan, dan kerukunan. Jadi agama itu tidak menghendaki perpecahan, permusuhan, dan pembunuhan. Namun kenyataannya, pengaruh agama terhadap masyarakat sering menimbulkan konflik. Para ahli sejarah atau filosof sosial menyatakan, bahwa agama sering mempunyai efek yang negatif

terhadap kesejahteraan manusia. Isu-isu keagamaan sering menjadikan timbulnya perang, keyakinan dalam suatu agama sering menimbulkan sikap manusia yang tidak toleran, loyalitas dalam agama hanya dapat menyatukan beberapa orang saja dan memisahkan dari kebanyakan orang lainnya.<sup>1</sup>

Secara sosiologis, konflik sosial adalah suatu fenomena yang biasa terjadi, suatu keniscayaan dan mungkin pula diperlukan dalam rangka menuju rekonsiliasi dan kesepakatan membuat komitmen menuju tatanan yang lebih konstruktif. Sebagai permisalan, mari menelaah secara singkat hubungan antara umat muslim dan umat Kristiani. Umat Islam sebagai pemeluk agama terbesar di negeri ini (mayoritas), mempunyai peranan sentral dalam menciptakan stabilitas nasional, ikut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan, sekaligus menikmatinya tentunya. Di pihak lain, pada tingkat nasional umat Kristiani sebagai kaum minoritas, meski pada tingkat lokal tertentu (provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan dan desa) terdapat kantong komunitas besar Kristiani. Persoalan mayoritas dan minoritas ini dapat menjadi sumber konflik, sehingga stabilitas nasional dibutuhkan sebagai faktor penting dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, masalah kerukunan antara umat Islam dan Kristiani secara nasional adalah masalah besar yang tidak boleh diabaikan dan harus terus-menerus memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak.

Permasalahan kerukunan hidup antara umat beragama di Indonesia, seperti halnya pada umat-umat ber-

agama di negeri lainnya, sering terganggu oleh riak-riak konflik sosial. Kenyataan seperti itu tidak jarang mencuat ke permukaan oleh pemberitaan media cetak dan elektronik. Secara kontekstual kerukunan antara umat beragama ini bisa menjadi labil, beragam doktrin dalam semua agama menganjurkan, menyerukan, dan bahkan memerintahkan umatnya selalu melakukan hal-hal yang positif guna mencapai kerukunan, persatuan, dan kesatuan serta cinta dan kasih kepada sesama.

## **B. SUMBER KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN**

Menurut Saifuddin, perbedaan faham beragama dapat berubah menjadi konflik tajam karena penafsiran bagian-bagian doktrin agama digunakan sebagai pembenaran. Agama dan budaya dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan karena keduanya berada dalam diri manusia yang sama. Dengan keterbatasannya, manusia berusaha menerjemahkan bagian-bagian dari agama ke dalam kenyataan kehidupan sosial yang penuh kepentingan duniawi, akan tetapi di lain pihak keteraturan sosial dan integrasi tetap terwujud.<sup>2</sup>

Dalam sebuah makalah berjudul "Akar Radikalisme Keagamaan: Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama", Azyumardi Azra mengemukakan bahwa salah satu faktor utama timbulnya konflik sosial keagamaan adalah munculnya benih radikalisme dalam agama, yang merebak tidak hanya antar agama, —seperti Islam

<sup>1</sup> Thomas F. O'dea. *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 139.

<sup>2</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali), 1986.

versus Kristen— melainkan juga di intern agama. Dalam skala mence- maskan, kelompok kelompok dan sel sel yang menampilkan radikalisme keaga- maan melakukan kegiatan terorisme dengan meledakkan bom bunuh diri di masjid al Zikra Mapolresta Cirebon (kasus Muhammad Syarif, 14/4/2011); atau meletakkan bom di lokasi strategis seperti saluran pipa gas (kasus Pepi Fernando 21/4/2011). Pada saat yang sama juga merebak kasus kasus meng- hilangnya 12 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang telah terekruit ke dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII).<sup>3</sup>

Meski demikian, Abdurrahman Wahid melihat bahwa kekerasan yang dilakukan para pemeluk suatu agama, bukanlah berangkat dari ajaran agama itu sendiri, melainkan lebih merupakan problem kontemporer berdasarkan situasi dan kondisi komunikasi pe- meluknya. Karena itu, agama tidaklah mengajarkan kekerasan, bahkan keke- rasan harus dikubur dalam-dalam ketika hendak menyelesaikan suatu persoalan dalam hubungan antarmanusia. Agama, dengan kata lain, memberikan makna kepada kehidupan dan eksistensi ma- nusia secara universal.<sup>4</sup>

Perkembangan terakhir, menurut Azra, meskipun Densus 88 telah berhasil melumpuhkan sebagian besar jaringan kelompok radikal al-Jama'ah al-Is- lamiyah (JI) yang melakukan berbagai aksi pemboman termasuk bom bunuh diri khususnya sejak Bom Bali I, Oktober 2002, jelas kelompok dan sel

radikal tetap bertahan. Bahkan terlihat bermetamorfosis ke dalam sel sel baru yang cenderung bergerak sendiri sendiri dan independen, meski dalam satu dan lain hal masih berkaitan satu sama lain. Menghadapi gejala seperti ini, kalangan figur publik dan masyarakat meng- anggap terus terjadinya peningkatan intoleransi dan radikalisme di lingku- ngan intra dan antar agama bahkan dengan negara. Gejala ini jelas dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi negara-bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Martin E. Marty menggarisbawahi munculnya radikalisme berawal dari pemahaman agama yang cenderung skriptural-tekstualis, sempit, dan hitam- putih. Pemahaman semacam ini dengan mudah akan menggiring pembacanya pada keyakinan yang cenderung funda- mentalis, bahkan sikap keagamaan yang kaku. Sedangkan fundamenta- lisme sendiri adalah spirit gerakan radikalisme agama yang mendorong penggunaan cara-cara kekerasan dalam memenuhi kepentingan dan tujuan mereka. Sehingga pada saat kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang tidak menentu, tidak sedikit manusia yang mengambil jalan “pintas” yang mengatasnamakan agama.<sup>6</sup>

Senada dengan E. Marty, Azra menyatakan bahwa kenyataan mere- baknya radikalisme agama terjadi melalui penafsiran, pemahaman, aliran, denominasi, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama tertentu. Di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari pemahaman

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, “Akar Radikalisme Keaga- maan: Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama”, Makalah, 14 Mei 2011.

<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid dkk. *Agama dan Ke- rasan*, (Jakarta: PP-IPNU, 1999), hal. 62.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, “Akar Radikalisme Keaga- maan.....”

<sup>6</sup> Martin E. Marty, *Fundamentalisms Compre- hended: The Fundamentalism Project*, (USA: University of Chicago Press, 1995), hal. 27.

keagamaan yang literal, sepotong-sepotong, dan *ad hoc* terhadap ayat-ayat al Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok Muslim lain yang umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat.<sup>7</sup>

Azra menganalisis, radikalisme keagamaan di dalam Islam juga dapat bersumber dari bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18, awal abad 19, dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel Salafi ini adalah pemurnian Islam—membersihkan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai 'bid'ah', yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan pemahaman dan praksis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini 'menyempal' (*splinter*) dari *mainstream* Islam yang memegang dominasi dan hegemoni otoritas teologis dan hukum agama dan sekaligus kepemimpinan agama.<sup>8</sup>

Radikalisme keagamaan juga masuk melalui deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, dan akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelom-

pok radikal. Kelompok "sempalan" tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultus (*cult*), yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sekarang waktunya bertobat melalui pemimpin dan kelompok mereka.

Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis seperti ini, tidak bisa lain dengan segera dapat menimbulkan reaksi dari agama-agama *mainstream*, yang dapat berujung pada konflik sosial. Radikalisme keagamaan jelas berujung pada peningkatan konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan antar agama; juga bahkan antar umat beragama dengan negara. Ini terlihat jelas, misalnya, dengan meningkatnya aktivitas penutupan gereja di beberapa tempat di mana kaum Muslim mayoritas, seperti di Bekasi, Bogor, dan Temanggung belum lama ini. Atau penutupan masjid/mushala di daerah mayoritas non-Muslim di berbagai tempat di tanah air, seperti di Bali pasca bom Bali Oktober 2002; termasuk pula anarkisme terhadap berbagai fasilitas dan masjid-masjid Ahmadiyah serta para jemaatnya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, "Akar Radikalisme Keagamaan...."

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Berbagai tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah juga masih terjadi di sejumlah tempat mulai dari NTB, Parung, Cikeusik dan berbagai lokasi lain. Lalu ada juga kelompok *hardliners* di kalangan Muslim, menegakkan hukumnya sendiri—atas nama syari'ah (hukum Islam)—seperti pernah dilakukan Lasykar Jihad di Ambon ketika terjadinya konflik komunal Kristen-Muslim; razia-razia yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dalam beberapa tahun terakhir ini—khususnya pada Ramadhan—atas diskotik, dan tempat-tempat hiburan lainnya atas nama *al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar* (menyeru dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Lihat Azyumardi Azra, "Akar Radikalisme Keagamaan...."

### C. PENDIDIKAN KARAKTER: SEBUAH IKHTIAR

Terapi atas konflik sosial-keagamaan yang berakar dari radikalisme pemahaman keagamaan tidaklah dapat dilakukan secara sporadis, tergesa-gesa, dan spontan. Dibutuhkan strategi yang efektif, jernih, dan berkala untuk mengeliminasi problem konfliktual tersebut, karena persoalannya tidak hanya terdapat pada aspek perilaku dan emosionalitas *ansich*, melainkan lebih berbasis pada pemahaman dan keyakinan. Di titik inilah diperlukan semacam terapi anti radikalisme agama sebagai sumber utamanya, yaitu melalui pembumian pendidikan karakter berbasis nilai moralitas (hati nurani), kerukunan, kedamaian, dan kemanusiaan.

Sebelum mengurai lebih jauh mengenai implementasi pendidikan karakter sebagai strategi metodis dalam konteks mengeliminasi konflik sosial-keagamaan, terlebih dahulu akan dijabarkan kerangka konseptual pendidikan karakter, agar didapati pijakan teoritik yang lebih tegas.

#### 1. Konseptual Pendidikan Karakter

Secara konseptual-definitif, tidak ada definisi pendidikan karakter yang memuaskan, karena setiap definisi biasanya hanya menekankan pentingnya aspek tertentu dan mengabaikan aspek lain. Begitu juga pandangan atau pendekatan disiplin keilmuan terhadap pendidikan karakter. Tak ada satu pun pendekatan keilmuan –dengan mengabaikan pendekatan disiplin keilmuan lain– yang memuaskan. Sifat pendidikan karakter adalah multidimensi dan multidisiplin, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif, utuh, interkoneksi antar berbagai disiplin

ilmu, tidak sektoral-parsial, *ad hoc*, apalagi atomistik.

Pendidikan karakter, menurut Amin Abdullah, mengasumsikan keterkaitan erat antara dimensi moral, sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, dan estetika. Pendidikan agama, begitu juga pendidikan kewarganegaraan pada level manapun tidak dapat berbuat banyak jika ia berdiri sendiri (*self sufficiency*), karena jika tidak dikaitkan dengan budaya, sosial, hukum dan politik misalnya, maka pendidikan agama hanya akan jatuh pada rumus-rumus dan preskripsi-preskripsi normatif, yang mungkin mudah dihapal, tapi seringkali tidak dapat dipraktikkan dan diimplementasikan dalam dunia sosial sehari-hari yang begitu kompleks.<sup>10</sup>

Menyadari kesulitan yang begitu kompleks, dengan mengambil inspirasi dari seorang filsuf Jerman era modern, Immanuel Kant, Amin menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan kemanusiaan yang bertujuan menjadikan manusia “baik”. Menjadikan manusia “baik” tanpa prasyarat apapun. Meskipun pendapat ini terkesan deontologis dan ahistoris, tapi justru di situlah letak kekuatan dan relevansinya saat ini.

Pada era negara bangsa (*nation states*), pendidikan karakter sangat diperlukan oleh bangsa manapun karena dengan Pendidikan Karakter yang berhasil akan membuat warga masyarakat dan warga negara menjadi “baik” tanpa prasyarat apapun. Menjadikan warga negara yang “baik”

---

<sup>10</sup> M. Amin Abdullah, “Pendidikan Karakter: Mengasah Kepekaan Hati Nurani”, Makalah, 15 April 2010.

tanpa embel-embel syarat agama, sosial, ekonomi, budaya, ras, politik, dan hukum. Pendidikan Karakter seperti ini sejalan dengan cita-cita kemandirian manusia (*moral outonomy*) dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Karakter yang sukses akan sama dengan tujuan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik dalam ranah multikultural, multietnis, multibahasa, multi religi di era globalisasi seperti saat sekarang ini.

Secara historis-filosofis, menurut Doni Koesoema, pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh pedagog Jerman F.W.Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi merupakan reaksi atas kejumudan pedagogi natural Rousseauian dan instrumentalisme pedagogis Deweyan. Selain itu pedagogi puerocentris lewat perayaan atas spontanitas anak-anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, Maria Montessori) yang mewarnai pedagogi di Eropa dan Amerika Serikat di awal abad 19 dirasakan semakin tidak mencukupi lagi bagi sebuah formasi intelektual dan kultural seorang pribadi.<sup>11</sup>

Konteks historis, Doni mengupas bahwa polemik anti-positivis dan anti-naturalis dalam konteks pendidikan yang berkembang di Eropa pada awal abad 19 merupakan gerakan pembebasan dari determinisme natural menuju dimensi spiritual, bergerak dari formasi personal yang lebih didominasi pendekatan psikologis-sosial menuju sebuah cita-cita humanisme yang kental dengan

<sup>11</sup> Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 2-4.

dimensi kultural dan religius. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang dipelopori oleh filsuf Perancis Auguste Comte (1798-1857).<sup>12</sup>

Mengutip Foerster, Doni menjabarkan tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara si subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya.<sup>13</sup> Lebih lanjut, kekuatan karakter seseorang dalam tampak dalam 4 (empat) ciri fundamental yang mesti dimiliki:<sup>14</sup>

*Pertama*, keteraturan interior melalui mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Ini tidak berarti bahwa karakter yang terbentuk dengan baik tidak mengenal konflik, melainkan selalu merupakan sebuah kesediaan dan keterbukaan untuk mengubah dari ketidakteraturan menuju keteraturan nilai.

*Kedua*, koherensi yang memberikan keberanian melalui mana seseorang dapat mengakarkan diri teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang.

<sup>12</sup> Doni Koesoema, "Pendidikan Karakter", *Kompas*, Jum'at, 3 Februari 2006.

<sup>13</sup> Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi, yang memberikan kesatuan dan kekuatan atas keputusan diambilnya. Karena itu, karakter menjadi semacam identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah kualitas seorang pribadi diukur. Lihat Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 3.

<sup>14</sup> Doni Koesoema, "Pendidikan Karakter, Kompas...."

*Ketiga*, otonomi. Yang dimaksud dengan otonomi di sini adalah kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat melalui penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan dari pihak lain.

*Keempat*, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang untuk mengingini apa yang dipandang baik, sedangkan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Kematangan keempat karakter ini, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. "Orang-orang modern sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dengan aku rohani, independensi eksterior dengan interior." Karakter inilah yang menentukan forma seorang pribadi dalam segala tindakannya.

## 2. Urgensi Pendidikan Karakter

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas ini dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian (berkarakter), sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Mengutip Thomas Lickona, Suyanto menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti

plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*).<sup>15</sup> Tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Menurut Suyanto, terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong-royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; (9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.<sup>16</sup>

Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode *knowing the good, feeling the good, dan acting the good*. *Knowing the good* bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah *knowing the good* harus ditumbuhkan *feeling and loving the good*, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi *engine* yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa

<sup>15</sup> <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>.

<sup>16</sup> Ibid.

orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka *acting the good* itu berubah menjadi kebiasaan.<sup>17</sup>

Dasar pendidikan karakter ini, menurut Suyanto, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (*golden age*), karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua.<sup>18</sup>

Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak *playgroup* dan taman kanak-kanak. Di sinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut *digugu lan ditiru*, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di kelas, yang berhadapan langsung dengan peserta didik.

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

### 3. Pendidikan Karakter Perspektif Kemanusiaan, Moralitas, dan Kerukunan: Upaya Mengeliminasi Konflik Sosial-Keagamaan

Membincang pendidikan karakter sebagai terapi mengatasi konflik sosial-keagamaan menuntut kehati-hatian, mengingat ranah konflik sosial-keagamaan cenderung berbeda dengan problematika kebangsaan yang lain semisal kekerasan di luar domain keagamaan. Dalam konteks ini, konflik sosial keagamaan, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tidak sekadar berhubungan dengan patologi sosial biasa, melainkan juga berkait erat dengan keyakinan, ideologi, *mindset*, dan bahkan politik, yang lantas melahirkan benih “radikalisme” sebagai faktor utama timbulnya konflik tersebut. Maka pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, sejauhmana pendidikan karakter mampu mengeliminasi radikalisme di Indonesia?

Selebihnya, ada banyak pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab, mengapa moralitas dan karakter bangsa Indonesia merosot, padahal pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama telah diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan? Terlebih di berbagai madrasah telah lama dipelajari materi ajar Aqidah Akhlak? Bukankah toleransi, kerukunan, perdamaian, dan kemanusiaan adalah bagian-bagian penting dalam mata pelajaran yang telah diajarkan di sekolah selama 12 tahun, dimana anak didik memperoleh tidak kurang dari 960 jam?

Di titik inilah, diperlukan kajian dan penelitian komprehensif dan mendalam tentang hal ini, melibatkan *stakeholders*, guru, dosen, dan anak didik untuk semua jenjangnya, peneliti, pengamat sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh agama, Ke-

menterian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, bahkan para jaksa, hakim, kepolisian, pengusaha, pejabat pemda dan masyarakat luas sebelum dilakukan pembenahan yang integratif-interkoneksi-menyeluruh dalam Pendidikan Karakter di tanah air. Penelitian dan kajian yang mendalam dan komprehensif perlu dilakukan secara periodik dan menjadi agenda nasional atau Rencana Aksi Nasional (RAN), jika saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun segenap warganegara pada umumnya memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis*.

Karena itu, tulisan ini sama sekali masih jauh dari keinginan menjadi formula dalam menjawab kegamangan sosial-keagamaan yang ada, melainkan sebagai “pemantik” untuk benar-benar secara serius menerapkan pendidikan karakter, bukan sekadar berbasis intelektualitas-kognitif, melainkan lebih menekankan aspek “penghayatan” (afektif) dan “pengamalan” (psikomotorik). Setidaknya gagasan dalam tulisan ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

*Pertama*, aspek pemahaman keagamaan tentang perdamaian, kerukunan, dan kemanusiaan. Hal ini diupayakan agar jangan sampai pendidikan karakter dengan pendekatan nilai keagamaan justru semakin menjauhkan pemahaman yang ramah terhadap realitas pluralisme, sebaliknya menjadi amunisi untuk kian menggumpalkan keyakinan radikalistik tentang “kebenaran eksklusif” terhadap suatu keyakinan agama. Salah satu pintu masuk radikalisme adalah dimensi pengetahuan yang kurang memadai atas nilai luhur yang terkandung dalam sebuah agama. Karena itu, memupuk karakter keagamaan sebaiknya juga dilandasi oleh

basis nilai keberagamaan dalam wilayah yang moderat (*tawassut*), seimbang (*tawazun*), toleran (*tasamuh*) dan tengah-tengah (*i'tidal*), berkebalikan dengan kekerasan (*tathorruuf*) dan anti teror (*irhab*). Serangkaian pemahaman atas nilai keberagamaan tersebut pada gilirannya akan membuka itikad untuk senantiasa melakukan “dialog” dalam mencari titik solusi ketimbang “anarkhi”.

Dalam konteks internalisasi nilai kerukunan, terdapat keluhuran nilai yang niscaya dipahami sebagai bagian penting dari “jatidiri” sebuah agama yang berpihak kepada aspek kemanusiaan. Dalam Islam misalnya, sebagaimana ajaran dari Rasulullah SAW terdapat beberapa macam persaudaraan yang patut dijalin dan sedemikian krusial dihayati dan diimplementasi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu persaudaraan antar umat Islam (*ukhwah Islamiyah*), persaudaraan antar umat manusia (*ukhwah basyariyah*), dan persaudaraan antar bangsa (*ukhwah wataniyah*).

Dalam rangka menghadapi paham radikalisme, tentu tidaklah cukup berbekal wacana, melainkan harus pula diimbangi oleh gerakan ideologisasi keagamaan perspektif humanitarian, yaitu dengan cara melakukan “*counter intellectual movement*” terhadap pemahaman keagamaan radikalistik tersebut. Selama ini, suburnya pemahaman radikalistik di domain pendidikan - sebagai pemicu potensi konflik sosial-keagamaan- lebih disebabkan oleh kelemahan ‘gerakan intelektual’ keagamaan moderat dalam mengimbangi ‘gerakan ideologis’ yang dilakukan oleh gerakan keagamaan kanan di berbagai sekolah, utamanya sekolah-sekolah, dan berbagai kampus negeri. Semestinya

dilakukan gerakan intelektual sekaligus gerakan ideologis moderat dengan menggunakan berbagai piranti akademis, utamanya melalui materi ajar, guru, dan beragam kegiatan intra sekolah dan intra kampus.

*Kedua*, pengarus-utamaan moralitas (*akhlaq al karimah*) sebagai praktik (amal), bukan sekadar intelektualitas, mengingat secara substansi, tidak satupun ajaran agama yang mengesahkan “kekerasan” dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal praktik inilah, pendidikan karakter mendapati urgansinya. Pendidikan karakter memang diawali dari pengetahuan dan pemahaman (teori) yang dapat bersumber dari pengetahuan agama, sosial, dan budaya. Namun yang paling penting dari rangkaian panjang ini adalah “menganamkan” apa yang diketahui.

Menurut Amin Abdullah, di sini terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan dalam menentukan paradigma pembelajaran pendidikan karakter di tanah air. Yang semestinya diperlukan adalah “menganamkan” berubah menjadi yang dipentingkan adalah “mengetahui” atau menghafal, tanpa kemampuan untuk melakukan dan mempraktekannya di lapangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dapat dijumpai secara mudah di tanah air bahwa model pembelajaran pendidikan karakter atau akhlak yang berjalan sekarang ini lebih mengutamakan ‘alih pengetahuan moral, agama atau karakter’ (*transfer of knowledge* tentang moral, agama atau karakter). Dengan paradigma pembelajaran seperti ini, maka yang ditekankan oleh pendidik adalah penguasaan materi sesuai diktat yang tersedia dan daya memorisasi (hafalan) lebih dipentingkan. Praktik ini tergambar dengan jelas dalam model soal ujian atau test yang dibuat oleh guru atau dosen. Akibat langsung yang tidak dirasakan selama bertahun-tahun adalah bahwa pendidikan karakter atau moral dan akhlak terlalu berorientasi pada intelektualisme etis. Padahal model paradigma pembelajaran pendidikan karakter (*humanities*) semestinya tidaklah seperti

Amin membedakan model dan paradigma pembelajaran sains dan matematika (*natural sciences*) berbeda dari model dan paradigma pembelajaran nilai kemanusiaan (*humanities*). Yang diperlukan dalam pembelajaran *humanities* dalam pendidikan karakter adalah kemampuan guru, dosen, pendidik, pemimpin untuk “menyentuh dan menyapa” keseluruhan dan keutuhan pribadi anak didik. Keutuhan pribadi manusia meliputi perasaan, rasio, imajinasi, kreativitas, dan memori. Dengan begitu, paradigma Pendidikan Karakter seharusnya lebih tajam diarahkan pada “kehendak” dan “motivasi”, dan bukannya intelektualitas. Oleh karena itu, yang perlu dikenal terlebih dahulu oleh para pendidik adalah struktur kepribadian manusia. Sedangkan motivasi atau kehendak sangat terkait dengan hati nurani. Maka pendidikan karakter adalah pendidikan hati nurani.<sup>20</sup>

*Ketiga*, indikator keberhasilan pendidikan karakter dalam konteks ikhtiar mengeliminasi konflik sosial-keagamaan sesungguhnya bermula dari tumbuhnya kesediaan untuk “menghargai nilai”. Menghargai nilai mengandung arti bahwa seseorang atau anak didik telah tersentuh hatinya dan dapat menyimpulkan bahwa nilai tersebut – semisal nilai kerukunan, nilai terhadap pentingnya perdamaian dan anti kekerasan, nilai saling menghargai perbedaan keyakinan— sebagai sesuatu yang indah dan baik untuk diri pribadi dan masyarakatnya. Pribadi-pribadi

---

pembelajaran sains (*natural sciences*) yang memang memerlukan ketajaman analisis intelektual. Lihat: M. Amin Abdullah, “Pendidikan Karakter: Mengasah Kepekaan Hati Nurani.....”

<sup>20</sup> Ibid.

tersebut menyatakan dalam hati masing-masing bahwa nilai-nilai baik itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dirinya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, terjadi tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam pendidikan karakter dalam konteks mengeliminasi konflik sosial-keagamaan, yaitu dari tindakan menghargai nilai, meningkat kepada penerimaan nilai dengan penuh kesadaran dan ketulusan, dan akhirnya berujung pada pengamalan dan penerapan nilai dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, negara bahkan sebagai warga dunia. Sampai di situ, maka nilai-nilai kebaikan tadi telah melekat, tertanam kokoh dan terbiasa dalam sekap terjang kehidupan anak didik, mahasiswa, dan anggota masyarakat dimanapun dan kapanpun serta dalam cuaca sosial, agama, politik, ekonomi yang bagaimanapun.

#### D. PENUTUP

Berbagai aspek penting dalam pendidikan karakter di atas, hemat penulis, dapat menjadi semacam upaya apresiatif dalam rangka ikut menyelesaikan konflik sosial-keagamaan yang masih rentan terjadi di negeri Indonesia tercinta ini. Beberapa rekomendasi yang perlu digarisbawahi adalah: diperlukan penyegaran sikap, komitmen seluruh warga masyarakat dan pembaharuan metode dan pendekatan pendidikan karakter yang lebih integratif-inter-

konektif-koordinatif. Keluasan teori dan praktik pendidikan karakter perlu dijadikan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan apa yang telah dilakukan selama ini.

Lebih lanjut, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila perlu dikaitkan dengan isu-isu baru yang lebih menyentuh kebutuhan dasar manusia (*Human Development Index*) seperti kesehatan (*reproductive health*), kesetaraan gender (*gender equity*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kesejahteraan ekonomi (*entrepreneurship*), dan rembug bersama para pemimpin agama (*faith-based organization*) tentang permasalahan sosial kebangsaan.

*Last but not least*, pendidikan karakter yang dimaksud penulis, tidak semata-mata bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial struktural. Meskipun pada gilirannya kriteria penentunya adalah nilai-nilai individual yang bersifat personal. Pendidikan karakter yang berkaitan dengan dimensi sosial struktural, lebih melihat bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif di tengah pertumbuhan individu. Dalam konteks inilah, kita bisa meletakkan konflik sosial keagamaan sebagai “musuh bersama” yang senantiasa mengancam keutuhan sosial dan struktural pondasi berbangsa dan bernegara. *Wallahu A'lam Bi As Showab.*]

---

<sup>21</sup> Zeni Luthfiah, *Pendidikan Agama Islam: Pendidikan Karakter Berbasis Agama Islam*, (Jakarta: Lingkar Media, 2011), hal. 38.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdurrahman Wahid dkk. 1999. *Agama dan Kekerasan*, Jakarta: PP-IPNU.
- Achmad Fedyani Saifuddin. 1986. *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Azyumardi Azra, 2011. "Akar Radikalisme Keagamaan: Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama", Makalah, 14 Mei 2011.
- Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo
- M. Amin Abdullah. 2010. "Pendidikan Karakter: Mengasah Kepekaan Hati Nurani", Makalah, 15 April 2010.
- Martin E. Marty, 1995. *Fundamentalisms Comprehended: The Fundamentalism Project*, USA: University of Chicago Press
- Thomas F. O'dea, 1987. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zeni Luthfiah. 2011. *Pendidikan Agama Islam: Pendidikan Karakter Berbasis Agama Islam*, (Jakarta: Lingkar Media.



## INDEKS PENULIS

---

### A

#### **Akmal Salim Ruhana**

"Terorisme [sama dengan] Jihad?"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 149

#### **Ali Usman**

Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta

"Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 65

#### **Arief Subhan**

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 81

### H

#### **Herdi Sahrasad**

Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina

"Agama dan Masalah Korupsi: Sebuah Catatan"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 1

### I

#### **Iyoh Mastiyah**

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 19

### N

#### **Nurudin**

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 31

### S

#### **Sudirman Tebba**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 113

### **Suprpto**

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

“Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 127

### **Syahrul Kirom**

Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

“Pancasila Dalam Bingkai Kerukunan Beragama”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 45

### **Syaripulloh**

Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Penanggulangan Kemiskinan”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 95

## KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

### **Buku (monograf)**

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

### **Artikel (Jurnal)**

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trek: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

### **Situs web**

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan (10%)
  - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
  - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
  - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
  - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
  - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
  - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
  - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

[jurnaldialog@yahoo.com](mailto:jurnaldialog@yahoo.com)

[soesary@yahoo.com](mailto:soesary@yahoo.com)